



Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Pedesaan Sukabumi: Identifikasi Tantangan dan Optimalisasi Peluang Melalui *Fokus Group Discussion (FGD)*

Asep Deni¹ & Wawan Ruswandi²

¹ Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, 43142

Telp: 085798887345

E-mail: adeni.abdibangsa@gmail.com

² Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

Hp. 085720090591

E-mail: wawan.mini75@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-01-06

Revised : 2025-01-26

Accepted: 2025-01-30

KEYWORD

Public Policy,

Employment

Poverty

KATA KUNCI

Kebijakan Publik,

Ketenagakerjaan

Kemiskinan

ABSTRACT

Poverty alleviation and employment in rural areas face challenges such as limited access to education, dominance of traditional agriculture, and lack of inter-agency coordination. This study employs Participatory Action Research (PAR) with Focus Group Discussion (FGD) involving BPS, OPD, academics, and community representatives in Sukabumi Regency. Data were analyzed using Thematic Analysis with source and method triangulation. The findings highlight key policy implementation challenges but also identify opportunities in community-based economic empowerment, technology utilization, and cross-sector collaboration. This study emphasizes the need for evidence-based policies to support sustainable rural economic resilience.

ABSTRAK

Pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan di pedesaan menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses pendidikan, dominasi sektor pertanian tradisional, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menggunakan *Participatory Action Research (PAR)* dengan *Focus Group Discussion (FGD)* melibatkan BPS, OPD, akademisi, dan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Data dianalisis menggunakan Analisis Tematik dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil menunjukkan tantangan utama dalam implementasi kebijakan, tetapi terdapat peluang dalam penguatan ekonomi berbasis komunitas, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Studi ini menekankan perlunya kebijakan berbasis bukti guna mendukung ketahanan ekonomi pedesaan secara berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi mensyaratkan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab program studi sebagai institusi maupun oleh dosen sebagai tenaga pendidik profesional. Melalui kegiatan ini, program studi dan dosen bisa memainkan peran penting dalam memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan keilmuan yang mereka kembangkan.

Pengabdian kepada masyarakat dapat juga di maknai sebagai salah satu pilar utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang bertujuan untuk menghubungkan keilmuan akademik dengan kebutuhan nyata di masyarakat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020). Pendekatan ini memungkinkan perguruan tinggi untuk berkontribusi secara langsung dalam perumusan kebijakan berbasis bukti, terutama dalam sektor

ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan. Dengan keterlibatan akademisi dan mahasiswa dalam proses analisis dan evaluasi kebijakan, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih inklusif, partisipatif, dan sesuai dengan konteks lokal (Chevalier & Buckles, 2019).

Salah satu metode yang banyak diterapkan dalam pengabdian masyarakat adalah *Participatory Action Research* (PAR). Metode ini berfokus pada partisipasi aktif masyarakat dalam penelitian, dengan tujuan menghasilkan perubahan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan (Israel et al., 2013). Dalam konteks pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan, pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan permasalahan yang mereka hadapi secara langsung, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi setempat. Melalui mekanisme seperti *Focus Group Discussion* (FGD), akademisi dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi tantangan utama, mengeksplorasi potensi lokal, dan menyusun strategi intervensi yang berbasis komunitas (Braun & Clarke, 2006).

Selain itu, penerapan *Community-Based Participatory Research* (CBPR) dalam studi kebijakan publik telah terbukti meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, karena mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan komunitas lokal (Wallerstein & Duran, 2017). Dalam studi yang dilakukan oleh Israel et al. (2013), pendekatan ini mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami serta berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan program ketenagakerjaan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, pendekatan pengabdian masyarakat seperti PAR dan CBPR menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat pedesaan.

Ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Hadi et al., 2025). Wilayah pedesaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia karena kurangnya akses pendidikan dan pelatihan, hingga minimnya infrastruktur ekonomi yang dapat menunjang pertumbuhan usaha lokal. Selain itu, ketimpangan

ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan semakin memperlebar kesenjangan sosial, yang berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan di daerah pedesaan. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada masyarakat desa harus dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk potensi lokal yang dapat dikembangkan serta hambatan yang perlu diatasi. Kajian terhadap kebijakan yang telah diterapkan menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi pedesaan sekaligus menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang berbasis pada potensi wilayah serta didukung oleh kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, diharapkan pengentasan kemiskinan di pedesaan dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Namun, menurut data yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten Sukabumi mencatat bahwa ketimpangan ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah pedesaan masih menjadi permasalahan utama yang berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan. Berdasarkan data yang dihimpun, angka pengangguran di pedesaan masih cukup signifikan, terutama di kalangan angkatan kerja muda yang memiliki keterampilan terbatas. Hal ini diperparah oleh minimnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Selain itu, mayoritas penduduk pedesaan masih bergantung pada sektor pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah, sementara diversifikasi ekonomi di sektor lain, seperti industri kreatif dan jasa, belum berkembang secara optimal. Kurangnya infrastruktur penunjang, akses modal, serta keterbatasan pasar menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Data BPS juga menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan semakin melebar, yang mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rumusan masalah: Bagaimana kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat bermanfaat dan mengimplementasikan strategi yang dapat dirumuskan melalui *Forum Group Discussion* (FGD) agar kebijakan ketenagakerjaan lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Dalam konteks kebijakan, data yang dikumpulkan oleh BPS menjadi landasan penting bagi perumusan strategi ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan. Namun, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan data oleh pemangku kepentingan untuk menyusun program yang tepat sasaran. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, tujuan kegiatan ini ialah memberikan arahan atau materi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Analisis Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan menjadi momentum penting untuk mengeksplorasi tantangan yang ada, menggali peluang yang dapat dioptimalkan, serta merumuskan kebijakan berbasis data yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Sukabumi.

2. Tinjauan Literatur

a. Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah sebuah peraturan yang mengurus kehidupan secara bersama dan wajib dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan konsekuensi yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, dan konsekuensi tersebut dijatuhkan secara terbuka oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Kebijakan publik juga mencakup keputusan-keputusan yang memiliki dampak moral dan berhubungan dengan keadilan sosial (Abdal et al., 2021)

Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil berdasarkan interaksi antara berbagai aktor politik, dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu melalui pertimbangan situasi dan kondisi yang ada. (Taufiqurakhman, 2014)

Kebijakan publik pada umumnya memiliki 3 komponen utama, yakni: 1. proses perumusan kebijakan (Formulasi kebijakan); 2. proses implementasi kebijakan; dan 3. proses evaluasi kebijakan (evaluasi kebijakan) (Deni, 2023).

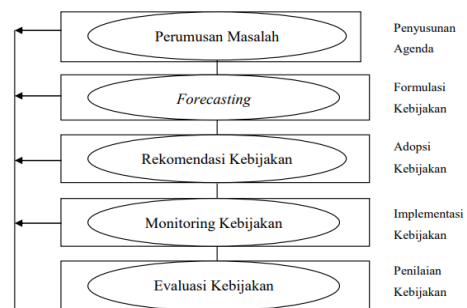
Kriteria yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan, menurut (Sobirin, 2017), antara lain:

- 1) Efektivitas – Menilai sejauh mana solusi kebijakan bisa memperbaiki situasi yang ada.
- 2) Efisiensi – Memastikan bahwa penggunaan dana yang akuntabel untuk mencapai hasil yang diharapkan
- 3) Kecukupan – Kebijakan harus bisa meraih hasil yang diinginkan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

- 4) Keadilan – Kebijakan harus mencerminkan nilai moralitas, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, serta tidak memihak.
- 5) Terjawab – Kebijakan dirancang untuk kebutuhan secara kelompok supaya terpenuhi / menyelesaikan permasalahan tertentu yang terjadi di masyarakat.

Penting untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan, baik yang memiliki wewenang resmi maupun tidak. Oleh karena itu, dalam praktik kebijakan publik, salah satu pendekatan yang digunakan adalah pengembangan mekanisme jaringan aktor (actor networks). Mekanisme ini memungkinkan terciptanya jalur-jalur informal (second track), yang berperan signifikan dalam menangani permasalahan kompleks yang sulit diselesaikan (Sucitra et al., 2024).

Berikut adalah proses dalam kebijakan publik (Taufiqurakhman, 2014):



Gambar 1. Tahapan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Sumber: William Dunn dalam Subarsono (2012:9)

Analisis kebijakan publik merupakan suatu bidang studi yang menggunakan berbagai prosedur dan sistem kerja Mengidentifikasi informasi yang penting bagi kebijakan. Dalam pengambilan keputusan di sektor publik, analisis ini sangat diperlukan oleh politisi, konsultan, dan pengambil kebijakan di pemerintahan untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam menghadapi permasalahan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan dalam menganalisis kebijakan untuk merumuskan kebijakan publik menjadi semakin besar (Fatmariyanti & Fauzi, 2023).

Berikut adalah gambar analisis kebijakan publik:



Gambar 2. Analisis Kebijakan Publik

b. Kemiskinan

Kemiskinan, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 24/2004, merupakan masalah dalam sosial ekonomi yang tidak memadai, sehingga individu atau kelompok tidak dapat menikmati hak-hak dasar untuk hidup dengan bermartabat. Oleh karena itu, perencanaan dan kebijakan pembangunan harus memprioritaskan upaya pengentasan kemiskinan. Namun, sering kali hasil yang diharapkan belum tercapai, mengingat kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks dan multidimensional (Rizal & Purnairawan Eka Riski, 2024).

BPS menetapkan sebanyak 14 parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan keluarga (Halimah et al., 2012) yaitu:

- 1) Tempat tinggal yang tidak memenuhi standar kesehatan, dengan luas lantai kurang dari 8 m² per orang
- 2) Kondisi lantai yang tidak nyaman, dengan jenis bahan yang tidak tahan lama, seperti tanah, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa pleste
- 3) Kondisi dinding yang tidak memadai, dengan jenis bahan yang tidak tahan lama, seperti bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa plester
- 4) Kondisi sanitasi yang tidak memadai karena harus berbagi dengan rumah tangga lain atau tidak memiliki akses ke fasilitas buang air besar
- 5) Tidak memiliki akses ke listrik sebagai sumber penerangan
- 6) Tidak memiliki akses ke sumber air minum yang aman, seperti sumur atau mata air terlindung
- 7) Menggunakan bahan bakar memasak yang tidak ramah lingkungan, seperti kayu bakar atau arang
- 8) Tidak memiliki kemampuan untuk mengonsumsi daging, susu, atau ayam secara teratur, sehingga hanya dapat melakukannya satu kali dalam seminggu

- 9) Tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian, sehingga dalam setahun hanya satu stel pakaian dapat membelinya
- 10) Mengonsumsi makanan dengan frekuensi yang rendah, yaitu dalam sehari hanya satu sampai dua kali.
- 11) Mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan Kesehatan karena tidak mampu membiayai pengobatan puskesmas.
- 12) Kepala rumah tangga bekerja dalam sektor yang tidak terlindungi dan berpenghasilan rendah, seperti buruh tani, buruh bangunan, atau buruh perkebunan yang berpenghasilan kurang dari enam ratus ribu rupiah.
- 13) Kepala rumah tangga berpendidikan maksimal tamatan SD.
- 14) Tidak memiliki aset yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti tabungan, sepeda motor, emas, atau ternak

Sedangkan menurut (Adawiyah, 2020) bahwa Indikator kemiskinan masyarakat desa meliputi:

- 1) Keterbatasan akses terhadap pendidikan.
- 2) Kepemilikan ladang dan keterbatasan kepemilikan aset bidang pertanian.
- 3) Tidak memiliki peluang berinvestasi di bidang pertanian.
- 4) Tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, papan, atau perumahan, karena keterbatasan ekonomi
- 5) Penggunaan metode pertanian secara tradisional.
- 6) Rendahnya produktivitas bisnis.
- 7) Tidak memiliki uang simpanan.
- 8) Jaminan kesehatan yang tidak memadai.
- 9) Tidak mempunyai perlindungan/asuransi atau jaminan sosial.
- 10) Adanya praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di pemerintahan desa.
- 11) Keterbatasan akses terhadap air bersih
- 12) Tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.

Klasifikasi kemiskinan berdasarkan konsumsi beras (Setiawan & Jamaliah, 2023), adalah sebagai berikut

- 1) Perkotaan: Dikatakan miskin jika konsumsi beras <420 kg per tahun.
- 2) Pedesaan:
 - Miskin jika konsumsi beras 320kg per tahun.
 - Miskin sekali bila konsumsi beras 240kg per tahun.

- Paling miskin bila konsumsi beras <180kg per thn.

Menurut (Nurwati, 2008), Dalam konteks waktu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi 4 jenis:

- 1) *Persistent Poverty* – Kemiskinan secara kronis atau turun-temurun, biasanya terjadi di daerah dengan sumber daya alam yang kritis atau wilayah terisolasi tanpa akses transportasi yang memadai.
- 2) *Cyclical Poverty* – Kemiskinan yang mengadaptasi siklus ekonomi secara komprehensif, di mana kondisi ekonomi yang memburuk berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
- 3) *Seasonal Poverty* – Kemiskinan secara musiman terjadi pada kelompok masyarakat dengan pekerjaan yang bersifat musiman, seperti nelayan dan buruh tani tanaman pangan.
- 4) *Accidental Poverty* – Kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor tak terduga seperti bencana alam atau dampak kebijakan tertentu yang menurunkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengembangkan strategi baru untuk mengatasi kemiskinan, beberapa isu kunci perlu dipertimbangkan (Permana & Arianti, 2012), yaitu:

- 1) Pendekatan lokal spesifik – Program penanggulangan kemiskinan harus disesuaikan dengan kondisi daerah dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah serta masyarakat setempat.
- 2) Perbaikan faktor produksi dalam era otonomi daerah – Termasuk kebijakan *land reform* via Perda dan pembentukan lembaga keuangan secara mikro untuk mendukung usaha rakyat.
- 3) Program pembangunan yang produktif – Harus berkontribusi pada pertumbuhan penghasilan masyarakat miskin di tingkat dasar secara berkesinambungan dengan pendampingan intensif.
- 4) Keterkaitan dengan demokratisasi dan desentralisasi, yang mencakup:
 - a. Penerapan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
 - b. Pemisahan tugas yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah
 - c. Kemitraan diantara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam penanganan kemiskinan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Menurut (Permana & Arianti, 2012), berikut adalah Visi Kedaulatan desa:



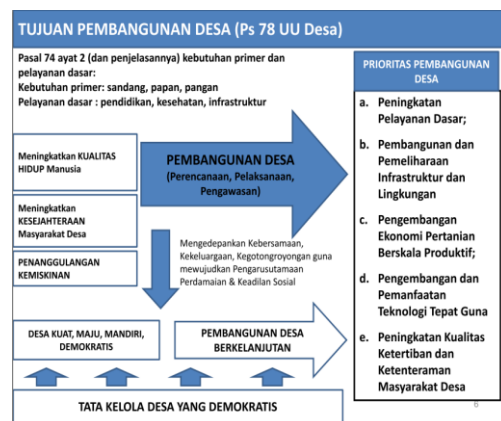
Gambar 3. Visi Kedaulatan Desa

Menurut (Permana & Arianti, 2012), berikut adalah gambar Komponen Pokok Pemberdayaan Desa / Masyarakat Desa



Gambar 4. Komponen Pokok Pemberdayaan Desa

Adapun Tujuan Pembangunan Desa dalam UU Desa pasal 78 (Permana & Arianti, 2012) adalah :



Gambar 5. Tujuan Pembangunan Desa

3. Metode

Kegiatan ini mengadopsi kerangka kerja *Participatory Action Research* (PAR) (Chevalier & Buckles, 2019) yang menekankan partisipasi aktif komunitas dan pemangku kepentingan dalam

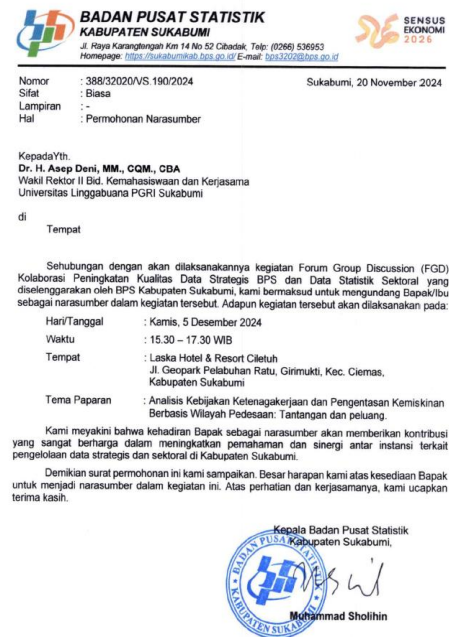
proses analisis dan pengambilan keputusan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin memberikan masukan kebijakan berbasis pengalaman dan data lapangan dari komunitas serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2024 di Laska Hotel & Resort Ciletuh Jl. Geopark Pelabuhan Ratu, Girimukti, Kec.Ciemas Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD) tentang Kolaborasi Peningkatan Kualitas Data Strategis BPS dan Data Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Sukabumi. Metode yang bisa diimplementasikan pada acara ini meliputi penyampaian materi, diskusi, dan interaksi. Untuk mewujudkan metode tersebut, tahapan yang bisa diimplementasikan ialah :

1) Tahap Persiapan

- a. Penulis melakukan sinkronisasi dengan Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik terkait pelaksanaan kegiatan FGD yang akan dilaksanakan di BPS Kabupaten Sukabumi.
- b. Penulis melakukan koordinasi dengan Kepala BPS Kabupaten Sukabumi tentang pengelolaan data strategis dan sektoral di Kabupaten Sukabumi
- c. Penulis menyiapkan semua yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.

2) Tahap Pelaksanaan

- a. Penulis menyampaikan materi mengenai Analisis Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Wilayah Pedesaan: Tantangan dan Peluang di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan surat undangan No. 388/32020/VS.190/2024 tanggal 20 Nopember 2024.



Gambar 6. Surat Permohonan Narasumber

- b. Penulis melakukan interaksi dengan pegawai Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi data Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Wilayah Pedesaan.

3) Tahap Monitoring dan Evaluasi

Penulis melakukan pendampingan dalam Menganalisis Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Wilayah Pedesaan di BPS Kabupaten Sukabumi.

4. Hasil

a. Gambaran Umum

BPS Kabupaten Sukabumi memainkan peran penting dalam pengumpulan dan penyajian data terkait ketenagakerjaan serta kemiskinan di wilayah pedesaan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, BPS berhasil memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut, termasuk tingkat pengangguran, sektor pekerjaan utama, serta distribusi pekerja di bidang non pertanian dan pertanian.

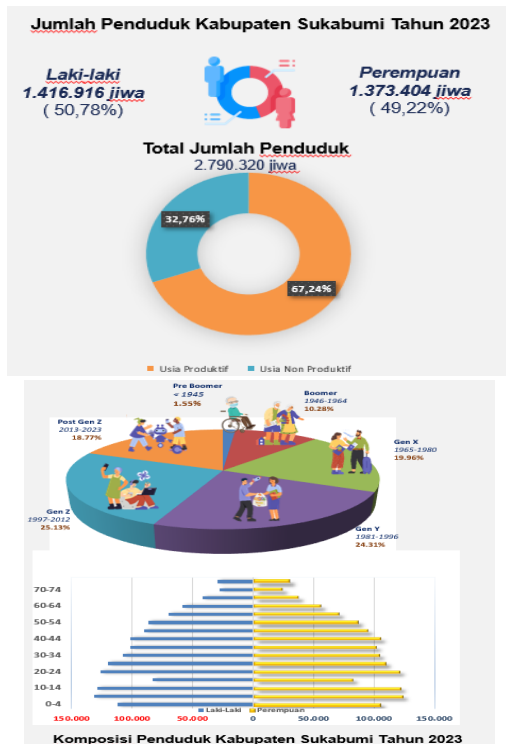
Berikut adalah gambar kerangka pemikiran RPJPD Kabupaten Sukabumi:



Gambar 7. Kerangka Pikir RPJPD Kab. Sukabumi

Dimana dalam menyusun naskah RPJPD 2025-2045 Kabupaten Sukabumi, Kerangka berpikir ini di dampaki oleh faktor internal dan eksternal, termasuk potensi dasar SDA, SDM, serta capaian pembangunan sebelumnya. Selain itu, tantangan perekonomian global, nasional, dan isu strategis lainnya juga turut memengaruhi.

Sedangkan Gambaran Demografi Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

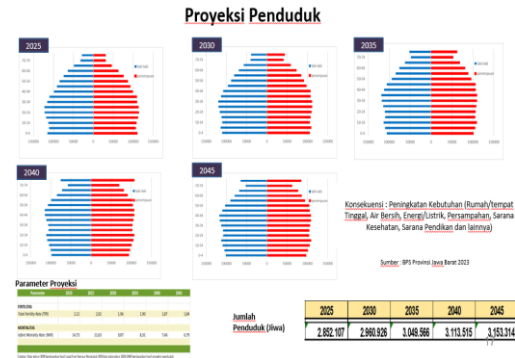


Gambar 8. Jumlah Penduduk Kab. Sukabumi, 2023 (Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Cakil, Smt 2 tahun 2023)

Berdasarkan data diatas, bahwa Penduduk Usia Produktif = 1.876.096 (67,24 %) Usia non produktif = 914.224 (32,76 %), dengan nilai *Dependency Ratio* (DR) adalah 49, artinya 100 penduduk usia produktif (15-65 tahun) berbanding 49 penduduk usia non produktif (0-14 tahun + > 65 tahun). Hal

ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sukabumi telah terjadi bonus demografi yang ditandai nilai DR antara 40-50.

Adapun untuk proyeksi penduduk pada tahun 2025, 2030, 2049, 2045, Sebagai berikut



Gambar 9. Proyeksi Penduduk Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2023

b. Pelaksanaan Kegiatan

Penulis menyampaikan materi mengenai Analisis Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Wilayah Pedesaan: Tantangan dan Peluang di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Peningkatan Kualitas Data Strategis BPS dan Data Sektoral". Kegiatan ini dilaksanakan di hotel laska sukabumi dan dibuka langsung oleh kepala BPS Kabupaten Sukabumi yang dihadiri oleh berbagai stakeholder salah satunya OPD Kabupaten sukabumi yang memiliki peran penting dalam penyediaan dan pemanfaatan data sektoral.



Gambar 10. Penyampaian Materi dalam FGD

Dalam penyampaian materi ini, dijelaskan mengenai capaian indikator makro dari tahun 2005 hingga 2023 serta proyeksi target yang direncanakan untuk periode 2025 hingga 2045. seperti tertera dalam gambar berikut:



Gambar 11. Capaian Indikator Makro 2005-2023 dan Proyeksi Target Tahun 2025-2045
Sumber : Hasil Analisis, 2024

Di dalam hal ini Proyeksi Tahun 2045 menggambarkan kondisi kinerja yang masih *Business As Usual* (BAU), sehingga perlu skenario kebijakan yang bersifat transformatif.

Selain Capaian indikator makro, penulis juga menyampaikan materi tentang isu strategis Kabupaten Sukabumi 2025-2045 yaitu

- 1) Dalam Bidang SDM dan Sosial:
 - Sumber Daya Manusia yang mempunyai Karakter yang Unik dan Berdaya Saing secara Global
 - Lingkungan Sosial yang inklusif dan dan maju
- 2) Bidang Ekonomi:
 - Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan berdaya saing serta Berkesinambungan
- 3) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
 - Akses yang merata dan infrastruktur dasar yang tersedia secara berkualitas
 - Keberlanjutan Kualitas Lingkungan Hidup
- 4) Bidang Pemerintahan:
 - Pemerintahan yang Efisien dan Akuntabel dengan Penggunaan Teknologi Digital dan Sistem Informasi

Kemudian menyampaikan materi tentang Keselarasan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat dengan RPJPD Kabupaten Sukabumi 2025-2045 yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Keselarasan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kab Sukabumi 2025-2045

Sasaran Visi	RPJPD PROVINSI JAWA BARAT 2025-2045			RPJPD KABUPATEN SUKABUMI 2025-2045		
	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1. Peningkatan Perekonomian per kapita	a. PDRB per kapita (Rp Miliar)	57,14 - 57,42	273,17 - 325,25	a. PDRB per kapita (Rp Miliar)	28,965 - 31,305	40,865 - 58,365
	b. Indeks Ekonomi Baru Indonesia (IEBI)	54,65	495,56	b. Indeks Ekonomi Baru Indonesia (IEBI)	NA	NA
	c. Komposisi PDB Industri Pengolahan (%)	41,15 - 41,38	48,43 - 47,83	c. Komposisi PDRB Industri Pengolahan (%)	17	22,6
2. Peningkatan Kemudahan dan Daya Saing	a. Tingkat Kemudahan (%)	5,35 - 5,85	0,09 - 0,34	a. Tingkat Kemudahan (%)	6,29 - 6,41	0,71 - 1,17
	b. Rasio gni (indeks)	0,49 - 0,429	0,397 - 0,360	b. Rasio gni (indeks)	0,327 - 0,368	0,3074
	c. Komposisi PDRB Primer (%)	12,54	10,77	c. Komposisi PDRB Konsumsi (%)	3,13	3,3
3. Kerjasama dengan Dunia Internasional	Jumlah Kerjasama Internasional	NA	NA	Jumlah Partisipasi Daerah dalam Even Internasional	5	7
	Indeks Modal Manusia	0,55	0,69	Indeks Modal Manusia	NA	NA
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Persentase emisa GRK menyerap per-anthrop	0,91	75,94	Persentase emisa GRK menyerap per-anthrop	NA	NA

Selain penyampaian Materi, Penulis juga berdiskusi dengan para peserta FGD yaitu Pegawai BPS Kabupaten Sukabumi.



Gambar 12. Diskusi dalam PGD

Dimana dalam diskusi ini penulis dengan peserta berdiskusi tentang Skenario Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukabumi 2025-2045, Adapun materi diskusi nya bisa terlihat dalam gambar berikut :



Gambar 13. Skenario Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukabumi 2025-2045.

Dalam hal berdiskusi tentang Korelasi Visi Kabupaten Sukabumi Maju, Mandiri dan Berkelanjutan dengan Skenario Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukabumi 2025-2045, dimana pada tahap RPJMD ke-1 sebagai fondasi pada tahun 2025-2029 yaitu Peningkatan dan Penguatan Kesinambungan Capaian Kinerja Pembangunan di Sektor Unggulan sebagai Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola, tahap RPJMD ke-2 sebagai Akselerasi pada tahun 2030-2034 yaitu Percepatan pembangunan melalui Peningkatan kualitas SDM, infrastruktur dan konektivitas wilayah, dan kualitas pelayanan publik untuk peningkatan daya saing perekonomian yang inklusif berbasis pada sektor unggulan, tahap RPJMD ke-3 sebagai Pemantapan pada tahun 2035-2039 yaitu Pemantapan daya saing perekonomian yang inklusif, tangguh dan lestari pada sektor unggulan melalui transformasi daya saing SDM, pemerataan infrastruktur wilayah berkualitas dan pelayanan publik berkelas dunia dan terakhir tahap RPJMD ke-4 sebagai perwujudan pada tahun 2030-

2034 yaitu Perwujudan perekonomian yang tangguh dan lestari, SDM yang berdaya saing global, role model layanan dasar yang inklusif dan kualitas pelayanan publik berkelas dunia berbasis digital untuk pematapan kesejahteraan masyarakat.

Dalam diskusi ini juga bagaimana mimpi kabupaten Sukabumi pada tahun 20245 bisa terwujud, adapun mimpi tersebut adalah :

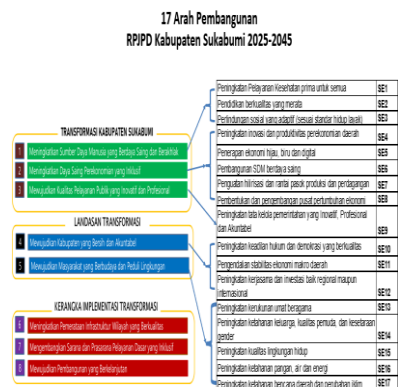
- Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Global
- Basis Perekonomian di Jawa Barat yang tangguh dan lestari
- Role model Bidang Infrastruktur dan pelayanan dasar yang inklusif
- Transformasi pelayanan publik berkelas dunia berbasis digital
- Ramah Lingkungan dan menjadi paru-paru Jawa Barat

Kemudian dalam tahap pelaksanaan FGD juga terdapat interaksi tanya jawab antara pemateri dengan peserta.



Gambar 14. Interaksi antara Pemateri dan Peserta FGD

Pada sesi ini pemateri menyampaikan 17 Arah Pembangun Kabupaten Sukabumi 2025-2045 atau Terwujudnya Sukabumi Emas (SE). 17 arah pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :



Gambar 15. 17 Arah Pembangun Kabupaten Sukabumi 2025-2045

Penjelasannya dari 17 Arah Pembangunan Kabupaten Sukabumi 2025-2045 adalah sebagai berikut :

Peningkatan Pelayanan Kesehatan prima untuk semua	SE1
Pendidikan berkualitas yang merata	SE2
Perlindungan sosial yang adaptif (sesuai standar hidup layak)	SE3
Peningkatan inovasi dan produktivitas perekonomian daerah	SE4
Penerapan ekonomi hijau, biru dan digital	SE5
Pembangunan SDM berdaya saing	SE6
Penguatan hilirisasi dan rantai pasok produksi dan perdagangan	SE7
Pembentukan dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi	SE8
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel	SE9
Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	SE10
Pengendalian stabilitas ekonomi makro daerah	SE11
Peningkatan kerjasama dan investasi baik regional maupun internasional	SE12
Peningkatan kerukunan umat beragama	SE13
Peningkatan ketahanan keluarga, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	SE14
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	SE15
Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi	SE16
Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	SE17

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian masih mendominasi lapangan pekerjaan, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya diversifikasi usaha dan keterbatasan akses terhadap pasar serta teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan Kabupaten Sukabumi masih cukup tinggi, dengan banyak keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Namun, peluang untuk pengentasan kemiskinan juga terlihat melalui potensi pengembangan sektor pertanian berbasis teknologi, penguatan pendidikan keterampilan, serta peningkatan akses terhadap layanan keuangan dan pasar. Dengan dukungan data yang disediakan oleh BPS, analisis kebijakan ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan dapat lebih terarah, memungkinkan pemerintah daerah merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat pedesaan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Dari hasil kegiatan dan pembahasan yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pengabdian masyarakat dalam bentuk *Focus Group Discussion* ini berlangsung dengan lancar. Materi yang disampaikan telah dipahami dengan baik oleh peserta FGD, yaitu pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi, sehingga diharapkan dapat diterapkan dalam mendukung analisis kebijakan ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan.

Hal ini telah dibuktikan dalam diskusi dan interaksi para peserta terlihat antusias dan aktif kemudian Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) ini telah berhasil mengidentifikasi berbagai hambatan serta potensi yang dapat dioptimalkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa tantangan utama dalam ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan meliputi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, minimnya diversifikasi lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian, serta keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap layanan keuangan.

Namun, FGD ini juga menyoroti berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi ketenagakerjaan dan mengurangi angka kemiskinan, seperti penguatan ekonomi berbasis komunitas, pemanfaatan teknologi dalam pertanian dan usaha mikro, serta sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis data untuk mengoptimalkan potensi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

6. Persembahan

Penulis mengucapkan terima kasih pada BPS Kabupaten Sukabumi yang sudah memberikan kesempatan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberian materi mengenai Analisis Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Pedesaan: Identifikasi Tantangan dan Optimalisasi Peluang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Berliana, M.Pd., dan Bapak Eris Juliansyah, M.M selaku Kepala dan Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi atas bimbingan dan dukungannya dalam menyelesaikan kegiatan ini. Penghargaan yang sama juga ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi bagi peserta maupun masyarakat secara luas.

7. Referensi

Abdal, A. R. H., Maharani, A. E., & Qori, A. L. (2021). Kebijakan publik sebagai keputusan moral. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, *19*(1), 13–22. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.59>

- Adawiyah, E. (2020). Kemiskinan dan faktor-faktor penyebabnya. *KHIDMAT SOSIAL, Journal of Social Work and Social Service*, *1*(1), 43–50.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Chevalier, J. M., & Buckles, D. J. (2019). *Participatory action research: Theory and methods for engaged inquiry* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351033268>
- Deni, A. (2023). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, evaluasi dan analisis*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan publik versi William Dunn: Analisis dan implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, *1*(1), 1–9.
- Hadi, F., Akib, Y., Novriansyah, M. A., & Wolok, E. (2025). Kemiskinan Provinsi Gorontalo: Tantangan dan strategi penanggulangan 2012–2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, *7*(3), 1203–1215.
- Halimah, et al. (2012). Analisis kemiskinan rumah tangga melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Journal of Economics*, *1*(1), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan, dan alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, *10*(1), 1–11.
- Permana, A. Y., & Arianti, F. (2012). Analisis pengaruh PDRB, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004–2009. *Diponegoro Journal of Economics*, *1*(1), 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/>
- Rizal, A. D., & Riski, P. E. (2024). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Joko Widodo. *Journal of Social Movements E-ISSN*, *1*(1), 3032–3401. <https://journals.akademia.or.id/>
- Setiawan, I., & Jamaliah, J. (2023). Analisis kebijakan publik dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik*, *2*(5), 399–405. <https://doi.org/10.54543/etnik.v2i5.188>
- Sobirin, U. B. S. D. (2017). *Kebijakan publik*. CV. Sah Media.
- Sucitra, I. D., Pratiknjo, M. H., & Kawung, E. J. (2024). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, *10*(3), 67–68.

- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan publik, pendelegasian tanggung jawab kepada presiden*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Israel, B. A., Eng, E., Schulz, A. J., & Parker, E. A. (2013). *Methods for community-based participatory research for health* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). *Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Wallerstein, N., & Duran, B. (2017). The conceptual, historical, and practice roots of community-based participatory research and related participatory approaches to research. In N. Wallerstein, B. Duran, J. Oetzel, & M. Minkler (Eds.), *Community-based participatory research for health: Advancing social and health equity* (3rd ed., pp. 17–30). Jossey-Bass.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).